

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu wujud penerapan teknologi tersebut ialah implementasi *e-government*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia mulai memperoleh landasan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Selanjutnya, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis

¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Elektronik (SPBE) yang diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel.²

Salah satu bentuk implementasi SPBE secara konkret adalah penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), yang ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang pengelolaan arsip dinamis. hasil kerja sama antara Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).³ Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan arsip dan surat-menyurat secara digital yang memungkinkan proses administrasi berjalan secara cepat dan terdokumentasi dengan baik, serta memfasilitasi komunikasi surat elektronik antar instansi pemerintah, baik dari pusat ke daerah maupun antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman pelaksanaan SPBE di daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengimplementasikan SPBE melalui Surat Edaran Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

³ Arsip Nasional Republik Indonesia, Pedoman Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Jakarta: ANRI, 2023).

mengenai Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) yang mengatur penggunaan aplikasi SRIKANDI pada setiap perangkat daerah.⁴

Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024 tidak hanya mengatur kewajiban penggunaan aplikasi SRIKANDI, tetapi juga menetapkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam penerapannya, meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, dukungan pimpinan, fasilitas pendukung, pelatihan pengguna, hingga penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Melalui ketentuan tersebut, penerapan aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu mendukung pengelolaan arsip sebagai memori organisasi dan alat bukti yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan temuan awal penelitian masih ditemukan penggunaan administrasi manual secara bersamaan dengan sistem digital, kendala jaringan internet, serta gangguan akses aplikasi pada beberapa perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan dalam Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024 belum sepenuhnya terwujud sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menunjuk administrator dan operator SRIKANDI pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2025 tentang Penunjukan Administrator SRIKANDI dan Operator SRIKANDI di

⁴ Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD).

Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.⁵ Berdasarkan keputusan tersebut, implementasi aplikasi SRIKANDI telah diterapkan pada perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta berbagai OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penunjukan administrator dan operator tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi serta telah ditetapkan pada lebih dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut menempatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas sebagai salah satu arah pembangunan daerah. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari misi pembangunan yang akan diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, termasuk implementasi SPBE dan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai instrumen

⁵ Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep./2025 tentang Penunjukan Administrator SRIKANDI, Operator SRIKANDI dan Administrator Sistem Informasi Kearsipan Nasional/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.

pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁶

Transformasi pengelolaan kearsipan menuju sistem digital pada dasarnya merupakan perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dari metode konvensional ke sistem berbasis digital. Proses pengelolaan kearsipan tersebut meliputi penciptaan arsip, baik melalui pembuatan maupun penerimaan surat, pengelolaan alur persuratan, penyimpanan arsip, hingga proses pemberkasan. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan arsip agar lebih efektif dan efisien melalui penerapan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong transformasi pengelolaan kearsipan dari sistem konvensional menuju ke sistem digital agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih modern, tertata, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Transformasi pengelolaan kearsipan menuju sistem digital diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam semua tahapan pengelolaan arsip, mulai dari proses penciptaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Penggunaan aplikasi tersebut memungkinkan setiap tahapan pengelolaan arsip terdokumentasi, tercatat, dan terpantau secara sistematis. Pengembangan sistem kearsipan berbasis digital diharapkan bisa meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan integrasi dalam pengelolaan arsip. Kondisi tersebut pada

⁶ Pemerintah Kota Sungai Penuh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029*

akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*.

Sebelum aplikasi SRIKANDI mulai digunakan, pengelolaan surat dan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh masih mengandalkan sistem konvensional yang berbasis dokumen fisik. Mekanisme disposisi surat dilakukan secara manual sehingga proses penyampaiannya membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, penelusuran arsip masih bergantung pada penyimpanan berkas fisik yang menyebabkan pencarian dokumen menjadi kurang praktis ketika diperlukan. Kondisi tersebut juga berdampak pada tingginya penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi perkantoran karena sebagian besar proses persuratan belum memanfaatkan sistem elektronik.

Penerapan Aplikasi SRIKANDI sebagai suatu bagian dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendorong transformasi proses administrasi pemerintahan ke arah digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan. Surat masuk, surat keluar, disposisi, serta pengelolaan arsip bisa dilakukan secara elektronik melalui satu sistem yang terintegrasi. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

Implementasi aplikasi SRIKANDI tidak sebatas mengalihkan proses persuratan dan kearsipan ke dalam bentuk digital, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Tata kelola

administrasi yang berkualitas tercermin dari pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung secara efisien, efektif, transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan sistem yang saling terhubung, setiap dokumen administrasi dapat dikelola, dilacak, disimpan, dan diakses secara elektronik sesuai kebutuhan. Atas dasar tersebut, penerapan aplikasi SRIKANDI menjadi salah satu sarana strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan berkualitas di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas tata kelola administrasi dapat dilihat dari meningkatnya efektivitas proses surat menyurat, percepatan disposisi dokumen, kemudahan pengelolaan dan penelusuran arsip, berkurangnya penggunaan dokumen fisik, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dokumen pemerintahan. Dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI, seluruh tahapan administrasi dapat dilaksanakan secara digital melalui platform yang terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan setiap dokumen tercatat secara sistematis, mudah ditelusuri kembali, serta memiliki rekam jejak pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, implementasi aplikasi SRIKANDI tidak sekadar menghadirkan pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembaruan tata kelola administrasi agar berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian PANRB, Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai SPBE 4,32 dengan predikat Memuaskan dan menempatkannya sebagai pemerintah kota dengan nilai SPBE tertinggi di Provinsi Jambi. Sementara itu, Kota Sungai Penuh berada diposisi keempat Provinsi Jambi dengan nilai SPBE sekitar 3,14, berpredikat Baik.⁷

Meskipun Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital pemerintahan melalui penerapan SPBE, berbagai tantangan masih ditemukan dalam implementasinya. Pelaksanaan tata kelola SPBE masih belum terintegrasi secara menyeluruh hingga mencakup seluruh unit kerja, termasuk unit kerja pada tingkat paling bawah dan sebagian besar capaian indeks SPBE masih didukung oleh kebijakan internal serta aplikasi umum yang disediakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan implementasi aplikasi pendukung SPBE, termasuk aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik.⁸

Meskipun demikian, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh tahun 2024, Tingkat perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku telah mencapai 90%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Namun laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kearsipan belum

⁷ ANTARA Jambi, "Pemkot Jambi Raih Predikat Memuaskan Indeks SPBE", <https://jambi.antaranews.com>, diakses 10 Mei 2026.

⁸ Pemerintah Kota Sungai Penuh, *RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029*, hlm. II-88 dan II-200.

sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta belum tersedianya depo arsip daerah.⁹

Meskipun berbagai kebijakan dan capaian tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan tata kelola administrasi berbasis digital, dalam praktiknya implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem administrasi berbasis elektronik.

Sejalan dengan hal itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029 menetapkan arah kebijakan pada peningkatan kualitas layanan kearsipan melalui penerapan sistem kearsipan digital terintegrasi, dengan salah satu indikator kinerja utama (IKU) berupa persentase OPD yang menerapkan SRIKANDI, ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2029.¹⁰ Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperkuat tata kelola administrasi berbasis elektronik secara menyeluruh.

Selain itu, berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari operator aplikasi SRIKANDI pada beberapa perangkat daerah, implementasi aplikasi SRIKANDI masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perlunya peningkatan kapasitas pengguna, kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, serta masih adanya penggunaan administrasi secara manual pada beberapa kegiatan tertentu. Kondisi

⁹ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 (Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh, 2024), hlm. 22–25.

¹⁰ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 (Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh, 2025), hlm. 33–34.

tersebut menunjukkan bahwa transformasi administrasi pemerintahan berbasis elektronik masih memerlukan proses adaptasi dan penguatan kapasitas organisasi agar tujuan penerapan aplikasi SRIKANDI dapat tercapai secara optimal.

Walaupun aplikasi SRIKANDI telah diimplementasikan pada berbagai perangkat daerah di Kota Sungai Penuh, pelaksanaannya masih perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kajian ini difokuskan pada tiga elemen implementasi *e-government* menurut Indrajit, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*, guna menilai sejauh mana penerapan aplikasi SRIKANDI berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi SRIKANDI di berbagai daerah, di antaranya Resa Indah Pratiwi dkk. (2024) di Kota Samarinda¹¹, Diana Sari Pratiwi (2022) di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah¹², Amalia Putri (2023) di Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak¹³, Falas Dina Lorensa (2024) di Kabupaten Blitar¹⁴, dan Devia Tantri Puspitasari (2025) di

¹¹ Resa Indah Pratiwi, dkk, "Analisis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi menggunakan Metode TAM Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2024).

¹² Diana Sari Pratiwi, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah"

¹³ Amalia Putri, "Implementasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengelolaan Arsip di Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak," Skripsi tidak untuk diterbitkan (Siak: 2023).

¹⁴ Falas Dina Lorensa, "Implementasi EGovernment dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar pada Instansi Pemerintah (Studi pada Bagian Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar).

Kota Kediri.¹⁵ Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan aplikasi SRIKANDI tidak semata-mata dipengaruhi oleh tersedianya teknologi, tetapi juga bergantung pada dukungan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji implementasi aplikasi SRIKANDI pada wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kota Sungai Penuh masih sangat terbatas. Padahal, daerah tersebut memiliki tantangan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan kemampuan adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum secara mendalam mengaitkan implementasi aplikasi SRIKANDI dengan peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis digital. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan administratif dan teknis. Berdasarkan kondisi tersebut, letak kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya memandang aplikasi SRIKANDI sebagai sarana digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit (2004), yang menitikberatkan pada tiga elemen utama, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*, untuk menilai pelaksanaan aplikasi

¹⁵ Devia Tantri Puspitasari, "Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri"

SRIKANDI di Kota Sungai Penuh.¹⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi aplikasi SRIKANDI, terutama pada daerah yang memiliki karakteristik wilayah berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara implementasi sistem digital pemerintahan dan kualitas tata kelola administrasi di tingkat daerah.

Aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang mendukung transformasi administrasi pemerintahan menuju sistem digital. Melalui penerapan pengelolaan kearsipan secara digital, aplikasi ini berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi, karena setiap tahapan pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan hingga penyusutan, dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, administrasi berbasis digital memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih jelas sesuai dengan hierarki jabatan, sehingga setiap proses dapat ditelusuri secara transparan. Dengan demikian, potensi terjadinya saling melempar tanggung jawab dapat diminimalkan karena seluruh aktivitas dan alur kerja tercatat dalam sistem, serta setiap tahapan harus diselesaikan secara berurutan sebelum proses selanjutnya dapat dilakukan.

Selain memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab, penerapan sistem kearsipan digital juga mendukung peningkatan akuntabilitas melalui ketelitian dalam proses administrasi pemerintahan. Dalam praktiknya,

¹⁶ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12–15.

masih dijumpai berbagai kesalahan administratif dalam penyusunan kebijakan maupun dokumen pemerintahan yang menunjukkan belum optimalnya aspek akuntabilitas, terutama akibat kurangnya ketelitian dalam pelaksanaan administrasi. Digitalisasi pengelolaan administrasi berperan dalam meminimalkan kesalahan tersebut karena setiap tahapan pengelolaan dokumen dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dalam sistem. Pengelolaan arsip secara digital juga mendorong pencipta arsip untuk lebih cermat dalam menyusun surat sebagai tahap awal proses administrasi, mengingat dokumen yang telah dikirim melalui sistem tidak mudah diubah atau ditarik kembali. Dengan demikian, penerapan sistem kearsipan digital berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk administrasi pemerintahan melalui penyusunan dokumen yang lebih teliti, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memperkuat akuntabilitas, pengembangan sistem kearsipan berbasis digital juga mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pada hakikatnya, arsip menjalankan dua fungsi pokok yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi, yaitu sebagai rekaman sejarah dan sebagai alat bukti hukum. Sebagai dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan, arsip berperan dalam menunjukkan apakah proses administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketersediaan arsip yang dikelola secara tertib dan sistematis menjadi faktor penting dalam membuktikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa pengelolaan arsip yang baik, proses pembuktian terhadap pelaksanaan

administrasi pemerintahan akan mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, pengembangan layanan kearsipan melalui penerapan aplikasi SRIKANDI mempunyai peran yang strategis dalam hal mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari pentingnya dokumen arsip sebagai bukti fisik yang selalu diperlukan dalam proses pemeriksaan maupun audit terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, pengelolaan kearsipan yang baik melalui aplikasi SRIKANDI menjadi salah satu bentuk nyata dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan sistem kearsipan melalui transformasi digital dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem ini mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi serta kearsipan.

Berdasarkan berbagai data dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari kebijakan *e-government* telah memberikan perubahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan diduga dipengaruhi oleh dukungan regulasi, ketersediaan sumber

daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, implementasi tersebut masih memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari aspek *support*, *capacity*, dan *value*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Kota Sungai Penuh".

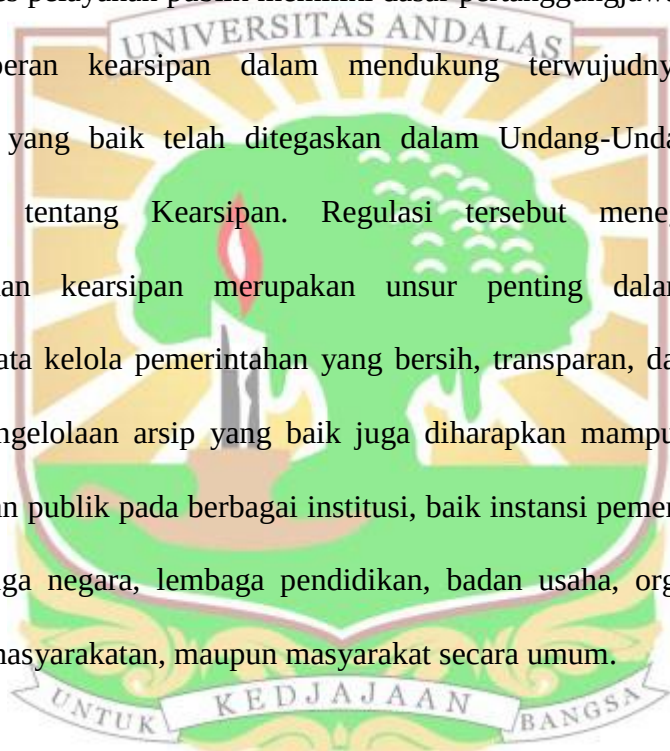
1.2 Rumusan Masalah

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah pemerintah dalam melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapan SPBE pada bidang administrasi pemerintahan diwujudkan melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem digital yang mendukung pengelolaan persuratan dan arsip. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses administrasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme manual, melainkan dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga pengelolaan dokumen menjadi lebih tertata, cepat, mudah ditelusuri, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik.¹⁷

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila pelayanan masih berlangsung secara lambat, berbelit,

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

tidak efisien, serta kurang terbuka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal. Salah satu unsur yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis sejak tahap penciptaan dokumen. Melalui pengelolaan arsip yang baik, setiap aktivitas administrasi dapat direkam dan ditelusuri dengan lebih mudah sehingga proses pelayanan publik memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas. Pentingnya peran kearsipan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan unsur penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Selain itu, pengelolaan arsip yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik pada berbagai institusi, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, lembaga pendidikan, badan usaha, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara umum.



Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menerapkan aplikasi SRIKANDI melalui berbagai regulasi daerah dan penunjukan administrator serta operator pada lebih dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029, pemerintah daerah menargetkan 100% perangkat

daerah menerapkan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari penguatan tata kelola administrasi berbasis elektronik.¹⁸

Tabel 1.1 Indeks SPBE pada Pemerintah Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2021-2024

Tahun	Indeks SPBE	Predikat
2021	1,44	Kurang
2022	1,97	Cukup
2023	2,38	Cukup
2024	3,14	Baik

Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PANRB Tahun 2021–2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh

Namun demikian, implementasi aplikasi SRIKANDI di Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024, Kota Sungai Penuh mendapat nilai 3,14 dengan kategori Baik dan masih berada di bawah Kota Jambi yang memperoleh nilai 4,32 dengan kategori Memuaskan.¹⁹

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan secara bertahap indeks SPBE dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 indeks SPBE berada pada angka 1,44 dengan predikat Kurang, kemudian meningkat menjadi 1,97 pada tahun 2022 dan 2,38 pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, ketika Indeks SPBE mencapai nilai 3,14 sehingga memperoleh predikat baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Sungai Penuh

¹⁸ Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029, hlm. 33–34.

¹⁹ Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024.

mengalami perkembangan yang semakin baik melalui penguatan kebijakan, layanan digital, infrastruktur teknologi informasi, dan implementasi berbagai aplikasi SPBE termasuk Aplikasi SRIKANDI.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Sungai Penuh masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan. Kondisi tersebut tercermin dari penyelenggaraan SPBE yang belum terintegrasi secara optimal serta belum diterapkan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling kecil, baik dalam mendukung pengelolaan administrasi internal maupun dalam meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pencapaian Indeks SPBE Kota Sungai Penuh masih didukung oleh penerapan berbagai kebijakan internal serta penggunaan aplikasi layanan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengembangan implementasi SPBE di Kota Sungai Penuh hendaknya diarahkan pada peningkatan tata kelola internal, penyusunan perencanaan teknis SPBE yang lebih komprehensif, serta pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan daerah melalui penyediaan layanan khusus SPBE.²⁰

Selain itu, dokumen LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2024 menunjukkan pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan belum optimalnya

²⁰ Pemerintah Kota Sungai Penuh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029* (Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh, 2025), hlm II-89

ketersediaan sarana serta prasarana pendukung, serta belum tersedianya depo arsip daerah yang memadai.²¹

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI sebagai sarana digitalisasi administrasi pemerintahan telah dilaksanakan sebagai instrumen digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan belum hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi semata. Tata kelola administrasi yang baik menuntut adanya dukungan kebijakan yang kuat, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur pendukung yang memadai, serta manfaat yang benar-benar dirasakan dalam proses administrasi pemerintahan. Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan optimal, maka tujuan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan belum sepenuhnya tercapai.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024, pelaksanaan aplikasi SRIKANDI memerlukan dukungan kualitas sistem yang baik guna menunjang efektivitas implementasinya, dukungan pimpinan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Melalui ketentuan tersebut, aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu mendukung pengelolaan arsip dan surat menyurat secara elektronik sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan temuan

²¹ LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2024, hlm. 22–25.

penelitian masih ditemukan penggunaan administrasi manual secara bersamaan dengan sistem digital, kendala jaringan internet, gangguan akses aplikasi, serta perlunya peningkatan kapasitas pengguna dalam proses adaptasi menuju kearah digitalisasi administrasi.

Meskipun penerapan aplikasi SRIKANDI telah dilaksanakan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, tingkat pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil rapat evaluasi penerapan aplikasi SRIKANDI, diketahui bahwa perangkat daerah yang aktif menggunakan aplikasi baru mencapai sekitar 80% atau sebanyak 27 perangkat daerah, sedangkan 7 perangkat daerah lainnya masih belum aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya mampu mendukung transformasi administrasi pemerintahan berbasis elektronik secara optimal karena masih dijumpai berbagai kendala dalam proses implementasinya.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai instrumen digitalisasi administrasi pemerintahan dengan kondisi pemanfaatannya pada perangkat daerah di Kota Sungai Penuh. Meskipun aplikasi SRIKANDI telah diterapkan pada seluruh perangkat daerah, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perangkat daerah yang belum aktif menggunakan aplikasi, penggunaan sistem manual dan digital secara bersamaan, kendala jaringan dan teknis, serta kebutuhan peningkatan kapasitas pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi

SRIKANDI masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana proses implementasinya berlangsung dan sejauh mana penerapannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Politik, khususnya mengenai implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan publik oleh indrajit, 2004 (*Support, Capacity, dan Value*) yang diterapkan pada konteks tata kelola administrasi pemerintahan daerah dan merupakan bagian dari digitalisasi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan yang menjadi kajian dalam Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, untuk meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SRIKANDI. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, serta optimalisasi sistem digital agar tata kelola administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

